

# Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

**Determinan Pembangunan Rumah di Kabupaten Merauke**  
*Fenti J. Manuhutu*

**Analisis Elastisitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manokwari**  
*Hans Sammy M. Salakory*

**Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan (Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian) Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manokwari**  
*Febby S. Matulesy*

**Pengaruh Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Semangat Kerja Karyawan  
Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Ambon**  
*Ventje Jeffry Kuhuparuw*

**Analisa Pengaruh Konflik Peran dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada  
PT. Bank Central Asia Cabang Utama Ambon**  
*Novalien C. Lewaherilla*

**Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan  
Pembelian Semen Tonasa Di Kota Ambon**  
*Maudy Marla Tanihattu*

**Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku**  
*Asmaria Latuconsina*

**Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bank Swasta  
di Kota Ambon**  
*Sherly Rutumalessy*

**Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan  
Kemiskinan di Maluku Utara: Pendekatan Model CGE**  
*Amran Husen*

**Bauran Pemasaran Jasa : Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Pada  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon**  
*Imelda Talahatu*

**Transformasi dan Reposisi Praktek Sumber Daya Manusia  
Dalam Mencapai Keunggulan Kompetitif**  
*Roy Alan Wattimena*

**Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan dan  
Variabel-Variabel Makro Ekonomi yang Mempengaruhinya  
di Kota Ambon**  
*Yerimias Manuhutu*  
*Desry Jonelda Louhenapessy*



# PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU

Asmaria Latuconsina

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura  
Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon

## ABSTRACT

*This study aims to find out the performance management of Maluku Provincial Revenue. This study uses secondary data that form Reports Local Revenue Target and Realization of Maluku Province during the period 2005 - 2009, responsible Accountability Report 2009, and GDP Maluku Province from 2005 to 2009. The results shows that PAD Maluku Province experienced positive growth, Local Taxes dominate the PAD, PAD elasticity of GDP is very elastic, Fiscal Decentralization ratio is very less, the ratio of PAD is in the effective category. Much needed improvement of facilities and infrastructure to improve efficiency of tax collection, as well as increased socialization local taxes through electronic and print media, and enhancing efficient service.*

**Keywords:** *Performance Measurement Local Genuine Income (PAD)*

## I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan pemerintah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004 dalam Mustafa 2009). Menurut Kaho, 1988 dalam Mustafa 2009), penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sangat tergantung dari kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukkan telah terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan demi peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam tatanan operasional kinerja pelayanan publik selama ini di Indonesia menciptakan penerimaan pendapatan asli daerah tidak optimal. Hal ini dapat dikaitkan dengan keluhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok organisasi ketika mengurus keperluan kebutuhan tertentu pada instansi pemerintah membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sehubungan dengan diterapkannya anggaran kinerja, pengukuran kinerja pun menjadi semakin penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menilai tingkat akuntabilitas instansi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka otonomisasi sangat dibutuhkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang merupakan bagian penting dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Mengingat peran strategis Dispenda Provinsi Maluku dan unit-unit pelayanannya dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, maka kinerjanya perlu dinilai dari perspektif finansial dan non finansial, seperti kinerja pendapatan daerah, dan pelayanan publik.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah Dispenda Provinsi Maluku dalam mengelola pendapatan asli daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, elastisitas PAD terhadap PDRB, derajat desentralisasi fiskal, dan ratio efektivitas PAD; (2) Untuk mengetahui kinerja efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispenda Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2009; (3) Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Bersama Samsat Ambon yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya. Pemerintah daerah provinsi memerlukan dana yang besar. Namun, kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan secara terencana

melalui kemampuan institusi yang inovatif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dalam hal ini kemampuan organisasi Dispenda diharapkan dapat berkinerja secara optimal untuk merealisasikan target-target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Mardiasmo dalam Mustafa (2009), *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. *Value for money* diartikan oleh Halim (dalam Mustafa, 2009) sebagai konsep pencarian dan penggunaan dana pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Artinya pemerintah daerah harus mempertimbangkan berapa dana yang diperoleh dan berapa yang dapat digunakan. Sebagai tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan anggaran adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efisien dan efektif.

Kinerja anggaran juga dapat dilihat melalui target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Karena itu Mahmudi dan Mardiasmo (dalam Mustafa 2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja hanya bermanfaat jika organisasi mampu membandingkan kenyataan atau realisasi dengan target yang hendak dicapai.

Dalam penelitian efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, Mal (1996) memanfaatkan data indikator kinerja (*input, output, dan outcome*) aktual (*actual*) dan rencana (*projected*). Perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas kegiatan didasarkan pada perbandingan antara rencana (*projected*) dengan aktual (*actual*). Rasio efisiensi kegiatan merupakan perbandingan antara efisiensi rencana (*projected efficiency*), sedangkan rasio efektivitas kegiatan merupakan perbandingan antara efektivitas rencana (*projected effectiveness*) dengan efektivitas aktual (*actual effectiveness*).

Kepuasan pelanggan terhadap kinerja instansi pemerintah merupakan indikator penting dari perspektif pelayanan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan oleh petugas dapat dijadikan indikator kinerja organisasi sektor publik. Menurut Mahmudi dalam Mustafa (2009) bahwa kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai tujuan tingkat tinggi dalam suatu sistem pengukuran kinerja.

Indeks Kepuasan Masyarakat seperti dijelaskan dalam Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai Kepmenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004, menyatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Dalam Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, ada 14 unsur pelayanan yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran. Unsur-unsur tersebut adalah : (1) Prosedur pelayanan; (2) Persyaratan pelayanan; (3) Kejelasan petugas pelayanan; (4) kedisiplinan petugas; (5) tanggung jawab petugas pelayanan; (6) kemampuan petugas pelayanan; (7) Kecepatan pelayanan; (8) Keadilan mendapatkan pelayanan; (9) Kesopanan dan keramahan petugas; (10) Kewajaran biaya pelayanan; (11) Kepastian biaya pelayanan; (12) Kepastian jadwal pelayanan; (13) Kenyamanan lingkungan, dan; (14) Keamanan pelayanan.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta perkembangan kinerja keuangan daerah Provinsi Maluku sebagai ukuran kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Maluku, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005–2009, LAKIP Dispenda Provinsi Maluku 2009, dan PDRB Provinsi Maluku 2005 – 2009.

Secara garis besar, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengukuran Kinerja Pendapatan Daerah. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi dalam Mustafa (2009), pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{PAD Th } t - \text{Realisasi PAD Th } t-1 \times 100\%$$

Dimana

PAD Th t-1 = Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

PAD Th t = Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

- Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Menurut Halim dalam Mustafa (2009), Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana :

X = Realisasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah

Y = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

- Elastisitas PAD terhadap PDRB

Elastisitas PAD terhadap PDRB dihitung dengan rumus :

$$\frac{\% \Delta \text{ PAD}}{\% \Delta \text{ PDRB}}$$

Dimana :

$\Delta$ PAD = Perubahan Pendapatan Asli Daerah

$\Delta$ PDRB = Perubahan Produk Domestik Regional Bruto

Berarti elastisitas PAD terhadap PDRB dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Presentase Pertumbuhan PAD}}{\text{Presentase Pertumbuhan PDRB}}$$

- Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (dalam Mustafa 2009), rumus yang digunakan untuk menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Dimana :

PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TPD = Realisasi Total nPendapatan Daerah

Kriteria penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal menggunakan kriteria yang digunakan oleh Mustafa (2009) mengikuti kriteria yang digunakan dalam penelitian Tim Fisipol UGM seperti dalam tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

<b>PAD / TPD (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
00 – 10,0s	Sangat kurang
10,01 – 20s00	Kurang
20,01 – 30s00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50.00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Mustafa (2009)

- Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim (2007), Rasio efektivitas PAD dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 100%.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

##### Pertumbuhan PAD

Dengan menggunakan rumus pertumbuhan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007), maka angka pertumbuhan PAD Provinsi Maluku selama lima tahun (2005 – 2009) seperti nampak dalam tabel 2 berikut :

**Tabel 2.** Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005 – 2009

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-Lain PAD Yang Sah	PAD
2005	-	-	-	-	-
2006	3,81	7,79	-80,00	106,00	4,35
2007	35,90	32,88	0	-100	30,79
2008	31,47	-16,26	106,93		41,18
2009	7,34	9,65	1494,78		12,32

*Sumber : Diolah dari Dispenda Provinsi Maluku*

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD selama lima tahun, baik secara total maupun komponen PAD mengalami pertumbuhan positif, kecuali komponen PAD Retribusi Daerah tahun 2007 ke 2008, hasil pengelolaan kekayaan daerah tahun 2005 ke 2006 dan lain-lain PAD yang sah 2006 ke 2007 mengalami pertumbuhan negatif.

Selama periode 2005 – 2009, rata-rata pertumbuhan realisasi PAD sebesar 22,16% tiap tahun, atau terjadi realisasi kenaikan PAD dari Rp 75.389.618.574 pada tahun 2005 menjadi Rp 163.151.069.219 pada tahun 2009. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 41,18% dan terendah pada tahun 2006 sebesar 4,35%. Angka laju pertumbuhan PAD meningkat secara positif dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dan relatif stabil.

##### Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Hasil perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD disajikan dalam tabel 3 berikut

**Tabel 3.** Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 2005 – 2009

TAHUN	PAJAK DAERAH		RETRIBUSI DAERAH		PAD
	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	
2005	51.141.312.467	67,84	16.147.100.864	21,42	75.389.618.574
2006	49.191.832.912	62,53	17.405.628.772	22,12	78.669.635.222
2007	66.852.757.238	64,98	23.127.789.173	22,48	102.889.282.912
2008	87.892.331.445	60,51	19.366.858.867	13,33	145.258.095.734
2009	94.343.653.686	57,83	21.235.537.983	13,02	163.151.069.219
<b>Jumlah</b>	<b>349.921.887.728</b>	<b>61,81</b>	<b>97.282.915.659</b>	<b>17,21</b>	<b>565.357.701.661</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>6.988.437.754</b>	<b>61,46</b>	<b>1.945.658.313</b>	<b>17,11</b>	<b>11.371.554.032</b>

*Sumber : diolah dari Dispenda Provinsi Maluku*

Seperti nampak pada tabel 3 di atas, nampak bahwa secara rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 61,46% per tahun, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 17,11% per tahun. Gambaran ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peranan besar dalam penerimaan PAD setiap tahun. Komponen yang memiliki kontribusi besar dalam pajak daerah adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBB KB (49,60%), kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (28,76%), dan Pajak Kendaraan Bermotor (21,02%) rata-rata setiap tahun. Sedangkan kontribusi tiga jenis pajak daerah lainnya (Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, dan Pajak

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan masih sangat kecil, masing-masing rata-rata setiap tahun 0,05%, 0,04% dan 0,15%.

Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air rendah karena biaya penarikan pajak tersebut menjadi mahal bila dibanding dengan besarnya pajak yang akan ditarik. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah Maluku yang terdiri dari daerah kepulauan. Sedangkan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah telah diserahkan ke Kabupaten/Kota sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD rata-rata setiap tahun seperti nampak pada tabel 3 hanya 17,11% setiap tahun dari tahun 2005 – 2009. Total penerimaan Retribusi Daerah naik dari Rp 16.147.100.864,- pada tahun 2005 menjadi Rp 21. 235.537.983,- pada tahun 2009. Penyumbang retribusi terbesar adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kehutanan. Kendala yang ditemui dalam pengelolaan retribusi daerah adalah ketersediaan data potensi riil daerah.

#### Elastisitas PAD Terhadap PDRB

Nilai elastisitas PAD terhadap PDRB Provinsi Maluku tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.** Elastisitas PAD terhadap PDRB Menurut Harga Konstan Tahun 2000

Tahun	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Elastisitas PAD Terhadap PDRB
2005	32,81	5,07	6,47
2006	4,35	5,55	0,78
2007	30,79	5,62	5,48
2008	41,18	4,23	9,74
2009	12,32	5,43	2,27
<b>Rata-rata</b>	<b>24,29</b>	<b>5,18</b>	<b>4,70</b>

Sumber: Diolah dari Dispenda Provinsi Maluku dan Maluku Dalam Angka Berbagai Edisi

**Tabel 5.** Elastisitas PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Elastisitas PAD Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
2005	32,81	12,9	2,54
2006	4,35	11,14	0,39
2007	30,79	12,18	2,53
2008	41,18	12,46	3,31
2009	12,32	12,75	0,97
<b>Rata-rata</b>	<b>24,29</b>	<b>12,29</b>	<b>2,00</b>

Sumber: Diolah dari Dispenda Provinsi Maluku dan Maluku Dalam Angka Berbagai Edisi

Pada tabel 4 dapat dilihat rata-rata elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga konstan selama tahun 2005 s/d 2009 rata-rata sebesar 4,70. Ini berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan kenaikan penerimaan PAD sebesar 4,7% (sangat elastis).

Pada tabel 5 dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku, maka angka elastisitas PAD terhadap PDRB Provinsi Maluku dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 2,00 juga elastis. Hal ini berarti pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, perkembangan penerimaan PAD Provinsi Maluku adalah elastis terhadap perkembangan basis pajaknya, baik dilihat atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku.

## Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Maluku selama kurun waktu 2005 s/d 2009 seperti nampak pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6.** Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2005 – 2009

Tahun	P A D	Pendapatan Daerah	DDF (%)	Kriteria
2005	75.389.618.574	396.904.741.857	19	Kurang
2006	78.669.635.222	556.557.562.908	14,14	Kurang
2007	102.889.282.912	637.303.246.664	16,14	Kurang
2008	145.258.095.734	793.690.832.309	16,75	Kurang
2009	163.151.069.219	867.231.596.716	18,80	Kurang
Rata-rata	11.371.554.032	650.337.596.127	17,38	Kurang

*Sumber : Diolah dari Dispenda Provinsi Maluku*

Selama kurun waktu 2005 s/d 2009 perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Maluku dalam katagori kurang. Artinya, PAD tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta mengindikasikan tingkat ketergantungan pada transfer pemerintah pusat sangat tinggi.

### Efektifitas PAD

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi Maluku selama periode 2005-2009, seperti nampak pada tabel 7 berikut.

**Tabel 7.** Efektifitas PAD Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2009

Tahun	Target PAD	Realisasi	(%)	Kriteria
2005	82.477.758.000	75.389.618.574	91,41	Efektif
2006	96.241.534.000	78.669.635.222	81,74	Efektif
2007	103.741.869.000	102.889.282.912	99,18	Efektif
2008	121.744.616.740	145.258.095.734	119,31	Efektif
2009	160.359.939.000	163.151.069.219	101,74	Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>98,68</b>	<b>Efektif</b>

*Sumber : Diolah dari Dispenda Provinsi Maluku*

Data-data efektifitas PAD Provinsi Maluku sebesar 98,68 dapat dikatakan efektif. Efektif terendah dicapai pada tahun 2006 sebesar 81,74 dan tertinggi pada tahun 2008 sebesar 119,31.

## VI. PENUTUP

### a.) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Secara umum hasil pengukuran kinerja pendapatan daerah memperlihatkan bahwa Dispenda Provinsi Maluku dengan penuh tantangan telah menghasilkan kinerja yang cukup dalam mengelola sumber-sumber PAD. Hal ini ditandai dengan beberapa hasil analisis rasio keuangan berikut ini.

- Dalam periode 2005 – 2009 PAD Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan positif berkisar antara 4,35% sampai 41,18% atau rata-rata 22,16 % per tahun.
- Pajak Daerah mendominasi perolehan PAD Provinsi Maluku dengan kontribusi rata-rata 61,46% atau sekitar 7 milyar setiap tahun, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah masih kecil, yaitu sekitar 17,11% per tahun, atau sekitar 2 milyar. Secara umum kendala dalam pengelolaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BKN-KA) meliputi aspek minimnya sarana dan fasilitas pemungutan sehingga biaya pemungutan menjadi jauh lebih tinggi dari besarnya pajak yang akan dipungut (inefisiensi).

- Provinsi Maluku mempunyai struktur PAD yang baik, ditandai dengan perkembangan penerimaan PAD yang elastis terhadap perkembangan dasar pengenaannya, baik PDRB atas dasar harga konstan (4,70) maupun PDRB atas dasar harga berlaku (2).
- Rasio Desentralisasi Fiskal (DDF) rata-rata hanya sebesar 17,38% setiap tahun, dan masuk dalam katagori kurang. Artinya kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam katagori kurang, dan ketergantungan pada Pemerintah Pusat cukup tinggi.
- Kemampuan Dispenda Provinsi Maluku dalam merealisasi PAD sesuai yang ditargetkan dalam katagori efektif ditandai oleh rasio efektifitas PAD rata-rata 98,68%. Terendah terjadi pada tahun 2006 (81,74%) dan tertinggi pada tahun 2008 (119,31%). Dalam 3 tahun tercapai di atas rata-rata dan dalam 2 tahun di bawah rata-rata.

#### **b.) Saran**

Beberapa saran peneliti ajukan kepada Dispenda Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah sebagai berikut :

- Peningkatan kerjasama intensif dengan dinas/unit kerja teknis atau instansi terkait dalam upaya peningkatan keandalan data subjek dan objek pajak dan retribusi daerah agar memiliki relevansi antara potensi dengan realisasi sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- Penyediaan dan peningkatan sarana dan fasilitas pemungutan pajak daerah.
- Peningkatan sosialisasi pajak daerah melalui media elektronik dan media cetak di daerah
- Peningkatan pelayanan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas pelayanan.

#### **REFERENSI**

- Halim, A 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_, 2007 Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga. Jakarta.
- Kunorotomo, 2005. Anggaran Berbasis Kinerja; Konsep dan Aplikasi; Yogyakarta MAP UGM.
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta; UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta.
- Mustofa B. dan Halim A., 2009, Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 7 No. 4.